

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pada prinsipnya pemberian otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah akan dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dalam hal ini bahwa salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, kemandirian dalam pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah makin diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi daerah. Lebih spesifik lagi, otonomi daerah merupakan suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki daerah secara optimal.

Dilaksanakannya desentralisasi secara menyeluruh membuat masing-masing Daerah memiliki wewenang selaku Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dick-Sagoe (2020) menyebutkan bahwa desentralisasi mencakup penyerahan kewenangan dalam tiga aspek, yaitu administrasi, politik, dan fiskal. Dalam

pelaksanaan wewenangnya tersebut, segala aktivitas Pemerintah Daerah pasti berkaitan dengan keuangan Daerah dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan pasti diiringi adanya aliran kas yang masuk atau keluar. Keuangan Daerah sendiri mencakup semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pelaksanaan kewenangan keuangan pemerintah di daerah, penerimaan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Namun salah satu sumber dalam dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah, dana ini dapat dipergunakan untuk belanja pegawai, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. sehingga dana alokasi umum berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Sehingga pemerintah bisa berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Belanja modal merupakan salah satu bentuk alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan

kesejahteraan. Hal ini didukung oleh pendapat Sabir (2015) yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal selain berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Maryaningsih, Novi., Hermansyah, Oki., & Savitri, Myrnawati (2014) juga menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jaringan listrik merupakan salah satu faktor pendukung atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sularso dan Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran yang dialokasikan dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian.

Selain keuangan daerah yang menjadi faktor yang mempengaruhi perekonomian, penambahan jumlah penduduk yang signifikan juga dapat mendorong ataupun menghambat perkembangan perekonomian (Sukirno, 2013) Penduduk yang meningkat akan menambah dan memperbesar jumlah tenaga kerja yang berakibat pada penambahan produksi serta dapat memperluas jaringan pasar.

Pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk ialah seluruh orang atau penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal di sebuah wilayah geografis Republik Indonesia berkisar kurang lebih 6 bulan yang bertujuan untuk menetap. Pernyataan di dalam Teori Malthus juga memperkuat dengan mengatakan perkembangan ekonomi dapat dilihat dari adanya penambahan jumlah penduduk.

Perkembangan ekonomi juga ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang baik dan benar akan memudahkan roda perekonomian menjadi baik pula, dan pemerataan ekonomi akan tercapai Ketika pembangunan terarah dengan baik. Menurut Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, di mana infrastruktur jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan meningkat suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modal di suatu daerah, di mana jalan berfungsi sebagai perangsang tumbuhnya ekonomi. Karena dengan tersedianya kondisi jalan yang baik akan menarik investor untuk melakukan investasi yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk melihat hal ini dapat ditunjukkan dalam perkembangan belanja modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	Rp. 136,501,710,000,000	-
2018	Rp. 142,902,000,000,000	4.69
2019	Rp. 149,111,090,000,000	4.34
2020	Rp. 148,448,820,000,000	-0.44
2021	Rp. 153,881,690,000,000	3.66
Rata-Rata		3.06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tabel 1.1. dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir, terjadi minus pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sebesar -0.44 persen. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dilandanya pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan ekonomi yang drastis. Dan di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai beranjak meningkat kembali yaitu sebesar 3.66 persen.

Tabel 1.2.
Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	Belanja Modal (Rp)	%
2017	Rp. 895,648,009,000	-
2018	Rp. 784,723,908,000	-12.38
2019	Rp. 866,500,806,000	10.42
2020	Rp. 642,696,111,000	-25.83
2021	Rp. 449,690,683,610	-30.03
Rata-Rata		-14.46

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan belanja modal di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang minus, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 dimana alokasi penganggaran di refofusing untuk membiayai kebutuhan dalam menanggulangi wabah Covid-19. Hal ini terlihat pada perkembangan belanja modal di tahun 2020 yang mengalami minus sebesar 25.83 persen, dan lebih tinggi meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar minus 30.03 persen.

Agar dapat meningkatkan belanja modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jambi, berikut dapat dilihat perkembangan variabel-variabel yang saling berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	%
2017	Rp. 1,580,533,417,000	-
2018	Rp. 1,656,569,597,000	4.81
2019	Rp. 1,651,689,944,340	-0.29
2020	Rp. 1,535,183,486,000	-7.05
2021	Rp. 1,834,431,187,000	19.49
Rata-Rata		4.24

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jambi juga mengalami minus tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 7.05 persen. ini juga berkaitan dengan dampak pandemi covid-19 di mana pendapatan masyarakat juga menurun dan mengalami ketidakstabilan ekonomi.

Tabel 1.4.
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	DAU (Rp)	%
2017	Rp. 1,397,912,161,000	-
2018	Rp. 1,399,367,134,000	0.10
2019	Rp. 1,433,203,410,000	2.42
2020	Rp. 1,288,418,327,000	-10.10
2021	Rp. 1,327,397,000,000	3.03
Rata-Rata		-1.14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Terlihat juga pada perkembangan dana alokasi umum di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2020 juga mengalami minus pertumbuhan, yaitu sebesar 10.10 persen. minus ini lebih tinggi dibandingkan minus pendapatan asli daerah. Terjadinya minus ini juga sama dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 dimana alokasi penganggaran banyak di alihkan untuk menangani wabah covid-19.

Tabel 1.5.
Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	DAK (Rp)	%
2017	934,827,673,236	-
2018	935,300,581,842	0.05
2019	1,067,008,374,054	14.08
2020	1,116,093,491,331	4.60
2021	1,130,374,763,000	1.28
Rata-Rata		-1.14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Terlihat pada perkembangan dana alokasi khusus (DAK) di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu tumbuh signifikan sebesar 14.08 persen. Sedangkan pada tahun 2021 DAK hanya tumbuh sebesar 1.28 persen. Penurunan pertumbuhan DAK ini dikarenakan dampak dari pandemic covid-19 yang masih dirasakan hingga tahun 2021.

Tabel 1.6.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	%
2017	3,515,017 jiwa	-
2018	3,570,272 jiwa	1.57
2019	3,624,579 jiwa	1.52
2020	3,548,200 jiwa	-2.11
2021	3,585,100 jiwa	1.04
Rata-Rata		0.51

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, yaitu mengalami minus pertumbuhan pada tahun 2020, yaitu sebesar minus 2.11 persen. hal ini mungkin di akibatkan banyaknya angka kematian yang terjadi di Tahun tersebut, dan di tahun 2021 jumlah penduduk berkembang kembali menjadi 1.04 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan 0.51 persen/tahun

Tabel 1.7.
Perkembangan Kondisi Jalan (Baik) di Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

Tahun	Kondisi Jalan (KM)	%
2017	1.384.830 KM	-
2018	897.806 KM	-35.17
2019	449.240 KM	-49.96
2020	324.220 KM	-27.83
2021	320.910 KM	-1.02
Rata-Rata		-28.50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan kondisi jalan dengan status baik di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan jumlah panjang jalan dengan status baik, yaitu dari 1.384.830 di tahun 2017 menjadi 320.910 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama Panjang jalan dengan status baik di Provinsi Jambi semakin berkurang, artinya status jalan dengan kondisi baik ini sudah banyak mengalami perubahan status kondisinya. Jika dilihat perkembangannya dari pertumbuhan Panjang kondisi jalan dengan status baik minusnya mulai menurun yaitu dari minus 35.17 persen menjadi minus 1.02 persen. harapannya Panjang kondisi jalan dengan status baik di Provinsi Jambi dapat segera membaik dan kondisi jalan yang rusak agar adanya penanganan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, peneliti memilih Provinsi Jambi sebagai obyek dalam penelitian ini yang diberi judul "**Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Kondisi**

Jalan terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi "

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang di dapat dalam penelitian ini di uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Kondisi Jalan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.
2. Bagaimana pengaruh belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Kondisi Jalan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis dampak belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, khususnya yang terkait pengembangan keilmuan (teoritis) dan studi empirik serta pengembangan kebijakan pembangunan, sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi, sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam perumusan strategi peningkatan belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
2. Bermanfaat sebagai dasar berpikir bagi pengembangan kegiatan penelitian selanjutnya, baik dengan lokasi dan waktu yang berbeda maupun dengan pengembangan dan penyempurnaan variabel-variabel penelitian terkait.